

**TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP PENETAPAN PERIODISASI
MASA JABATAN ANGGOTA DPR (STUDI PERBANDINGAN NEGARA
INDONESIA DAN BELANDA)**

SKRIPSI

Oleh:

Rara Aurel Ariana

NIM. 05040422106



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Aurel Ariana

NIM : 05040422106

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Belanda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2026

Yang menyatakan,



Rara Aurel Ariana

NIM. 05040422106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rara Aurel Ariana

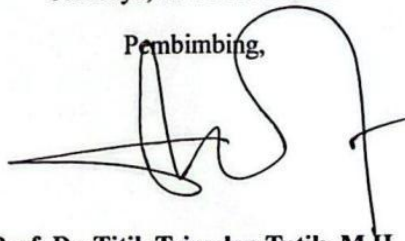
NIM : 05040422106

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Belanda)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rara Aurel Ariana

NIM. : 05040422106

Judul : Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Belanda)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III



Ahmad Fathan Aniq, S.S.I., MA.

NIP. 198401072009011006

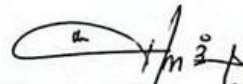
Penguji II



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Sofran Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rara Aurel Ariana
NIM : 05040422106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : raraaurelaaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR
(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Belanda)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 April 2026

Penulis

(Rara Aurel Ariana)

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penetapan periodisasi masa jabatan dalam instansi pemerintahan yang merujuk pada studi perbandingan negara Indonesia dan Belanda. Permasalahan utama terletak pada ketiadaan pembatasan jumlah periode masa jabatan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan dan melemahkan regenerasi politik. Maka dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Penetapan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Belanda).

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang - undangan *Statute Approach* yang merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang MD3, pendekatan komparatif *Comparative Approach* ini menggunakan perbandingan antara negara Indonesia dan Belanda dan pendekatan Konseptual *Conceptual Approach* mengkaji konsep *siyāsah dustūriyyah syar'iyah*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, melalui UUD 1945 Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1), menetapkan masa jabatan anggota DPR selama lima tahun tanpa pembatasan jumlah periode. Ketiadaan pembatasan ini menciptakan risiko konsentrasi kekuasaan, oligarki politik, dan rendahnya regenerasi politik. Sebaliknya, Belanda menetapkan masa jabatan empat tahun bagi anggota *Tweede Kamer* dengan fleksibilitas pembubaran dini yang menjaga akuntabilitas dan sirkulasi politik melalui sistem multipartai. Tren menunjukkan bahwa sistem parlementer Belanda lebih adaptif terhadap dinamika politik, sementara sistem Indonesia cenderung stagnan karena dominasi elit lama. Sedangkan hasil penelitian dalam perspektif fikih *siyāsah dustūriyyah*, masa jabatan merupakan amanah yang harus dibatasi untuk menjamin keadilan *'adl*, kemaslahatan *maṣlahah*, dan akuntabilitas *'amānah*. Pembatasan dua periode bagi anggota legislatif dinilai selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan mendukung regenerasi kepemimpinan.

Sejalan dengan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan dari segi politik yang membuat negara Belanda bisa dijadikan contoh untuk penetapan periodisasi di Indonesia. Penulis menyarankan untuk Indonesia bisa lebih adaptif dalam dinamika sistem politiknya yang lebih ketat untuk pemilihan selanjutnya dengan menerapkan pembatasan 2 periode untuk anggota yang ingin menjabat kembali.

DAFTAR ISI

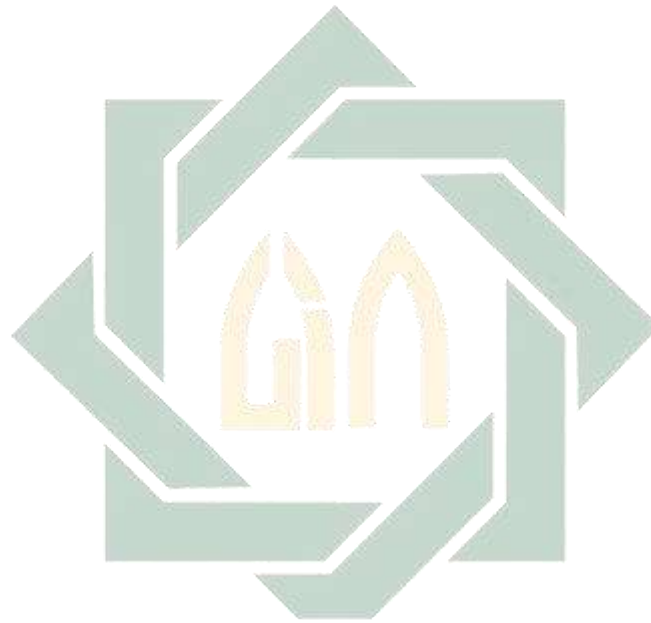
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional	19
I. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM TATA NEGARA: INTEGRASI KONSEP KONSTITUSI MODERN DAN KEKUASAAN DALAM ISLAM	27
A. Teori Kedaulatan Rakyat (<i>Popular Sovereignty Theory</i>).....	27
B. Teori Perbandingan Sistem Hukum (<i>Comparative Theory of Legal Systems</i>)	31
C. Teori Fikih <i>Siyāsah</i>	34
D. Teori Kekuasaan Jabatan dalam Islam	41
E. Teori Negara dan Konstitusi Modern	43
F. Teori Perbandingan HTN	49
G. Relevansi Fikih <i>Siyāsah</i> Terhadap Sistem Indonesia dan Belanda	52

BAB III PENGATURAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA DPR DI INDONESIA DAN BELANDA.....	55
A. Regulasi Parlemen Negara Indonesia dan Belanda.....	55
B. Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR di Indonesia	58
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024.....	66
D. Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota <i>Tweede Kamer</i> di Belanda.....	72
BAB IV TINJAUAN FIKIH <i>SIYĀSAH</i> TERHADAP PENENTUAN MASA JABATAN ANGGOTA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	82
A. Tinjauan Fikih <i>Siyāsh Dustūriyyah</i> Terkait Pengaturan Masa Jabatan Anggota DPR.....	82
B. Analisis Masa Jabatan Anggota DPR Menurut <i>Siyāsh Dustūriyyah</i>	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	107
BIOGRAFI PENULIS	114

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Periodisasi Masa Jabatan Pejabat Negara.	4
Tabel 2 Analisis Persamaan dan Perbedaan Periodisasi Masa Jabatan DPR Indonesia dan Belanda.	81
Tabel 3 Analisis Persamaan dan Perbedaan DPR Indonesia dan Belanda Menurut fikih <i>siyāsh</i>	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Cet. 1. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- . *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bambang Sugianto, dan Evi Oktarina. *Hukum Tata Negara - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Calabresi, Steven G. *The History and Growth of Judicial Review. Volume 1: The G-20 Common Law Countries and Israel*. New York, NY: Oxford University Press, 2021.
- . *The History and Growth of Judicial Review. Volume 2: The G-20 Civil Law Countries*. Oxford Scholarship Online. New York, NY, United States of America: Oxford University Press, 2021.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190075736.001.0001>.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Rousseau: The Social Contract and Other Later Political Writings*. 2nd ed. Edited by Victor Gourevitch. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316584606>.
- Samosir, Osbin. *Partai politik dan abad 21: pengertian, fungsi, dan praktek di Indonesia*. Jakarta: UKI Press, 2022.
- Santoso AZ, Lukman. *Negara hukum dan demokrasi: pasang surut negara hukum Indonesia pasca reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 2021.
- Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Moh Mahfud M. D. *Politik hukum di Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.

———. *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Edisi pertama. Edited by Nunuk Nuswardani. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Nugroho, Wisnu Agung, Citranu Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh Mujibur Rohman, Asti Dwiyanti, Erman Rahim, Hidayati Fitri, and Opniel Harsana BP. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia : Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyāsah*. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

B. Jurnal

Abdul Fida. *Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Uu No. 13/2019 Perpektif Maslahah*. n.d.

Afandi Sahidin, Ihtisab, Hotma Sibuea, and Hedwig Adianto Mau. “Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota DPR RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis.” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i2.272>.

Akmal, Diya Ul. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Belanda: Analisis Perbandingan*. 10 (2023).

Andeweg, Rudy B., Galen A. Irwin, and Tom Louwerse. *Governance and Politics of the Netherlands*. Bloomsbury Publishing, 2020.

Aqdamana, Tsabbit. “Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 2022): 601–16. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art11>.

———. “Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 601–16. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art11>.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Cet. 1. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

- . *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Auda, Gasir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2010.
- Bambang Sugianto, and Evi Oktarina. *Hukum Tata Negara - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Bovend'Eert, Paul, and Constantijn Kortmann. *Constitutional Law in the Netherlands*. Kluwer Law International B.V., 2023.
- Bovens, M. A. P., Robert E. Goodin, and Thomas Schillemans. *The Oxford Handbook Public Accountability*. OUP Oxford, 2014.
- Calabresi, Steven G. *The History and Growth of Judicial Review. Volume 1: The G-20 Common Law Countries and Israel*. New York, NY: Oxford University Press, 2021.
- . *The History and Growth of Judicial Review. Volume 2: The G-20 Civil Law Countries*. Oxford Scholarship Online. New York, NY, United States of America: Oxford University Press, 2021.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190075736.001.0001>.
- Chaidir, Ellydar. *Negara hukum, demokrasi, dan konstalasi ketatanegaraan Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press, 2008.
- David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin. "Teori Kedaulatan Negara." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (August 2024): 114–21.
<https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>.
- Titik Triwulan Tutik,. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.
- "MK Diminta Batasi Anggota DPR Cuma 2 Periode – DW – 28.10.2024," [dw.com](https://www.dw.com/id/mk-batasi-anggota-dpr/a-70615783), akses 7 Januari 2026, <https://www.dw.com/id/mk-batasi-anggota-dpr/a-70615783>.
- Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*. 3, no. 1 (2025): 18–24.
- Emon, Anver M. *Islamic Natural Law Theories*. n.d.
- Erwanto, Priscila Yunita. *Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia*. 2, no. 6 (2022): 45.

- Firdaus, Muhammad Fahreza Dicky. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/39671/>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 2021.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. n.d.
- Rudy B. Andeweg, *Governance and Politics of The Netherlands 5th Edition* Political Science, <https://www.scribd.com/document/916073103/Governance-and-Politics-of-the-Netherlands-5th-Edition-Rudy-B-Andeweg-download-full-chapters>. Akses 16 Desember 2025.
- "Grondwet Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden 2023." Akses 7 Agustus 2025 <https://open.overheid.nl/documenten/ronl-bfa3c90611c54fd791d929d4b94e0869ee6a7065/pdf>.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, and Leslie Green. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 2012.
- Hasibuan, Hazizah, Erna Susanti, Sabila Alhakim, Rahman, Riski Nasution, and Rahayu Pratiwi. "Pembatasan Masa Jabatan Pejabat Dua Periode Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 02 (2024). Indonesia, India. <https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims/article/view/113>.
- Heriani, Fitri Novia. "Periodisasi Pencalonan Anggota DPR Tak Terbatas, UU MD3 Dipersoalkan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/periodisasi-pencalonan-anggota-dpr-tak-terbatas--uu-md3-dipersoalkan-lt6733570307a08/). Akses 7 Januari 2026.
- . "Periodisasi Pencalonan Anggota DPR Tak Terbatas, UU MD3 Dipersoalkan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/periodisasi-pencalonan-anggota-dpr-tak-terbatas--uu-md3-dipersoalkan-lt6733570307a08/). Akses 7 Januari 2026.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (December 2013): 01–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.
- . "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (December 2013): 01–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>.

- Hulain, Hulain, Markoni Markoni, Achmad Edi Subiyanto, and Joko Widodo. "Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Journal on Education* 5, no. 4 (April 2023): 15121–42. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2602>.
- Imran, M. Fadil. "Perbandingan Sistem Hukum." *Penerbit Tahta Media*, May 1, 2024. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/746>.
- "Integriteitsregels Voor Kamerleden (Regelingen Integriteit)," Akses 16 Desember 2025, https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/integriteitsregels_voor_kamerleden.pdf.
- Irhamwibowo. "Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah Dustūriyyah Tasyrī'iyah." Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/37690/>.
- Kamis, Margarito. *Pembatasan kekuasaan presiden: pergeseran kekuasaan presiden pasca amandemen UUD 1945*. Cetakan pertama. Malang: Setara Press, 2014.
- Kansil, Christine S. T., and Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (June 2024): 192–203.
- Khaerunnaila, Wa Ode Fatihatul, Tunggul Ansari Setia Negara, and Abdul Madjid. "Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (June 2019): 176. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p176-185>.
- "Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali." Akses 7 Januari 2026. https://elibrary.uinbanten.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8961&keywords=.
- Legrand, Pierre. "How to Compare Now." *Legal Studies* 16, no. 2 (July 1996): 232–42. <https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.1996.tb00005.x>.
- Lev, Daniel. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. BRILL, 2021.
- Locke, John. *John Locke Two Treatises of Government*. 1st ed. Edited by Peter Laslett. Cambridge University Press, 1988. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511810268>.

- Louwerse, Tom. "Managing Increased Complexity in Dutch Coalition Politics." Tom Louwerse, October 31, 2024. <https://www.tomlouwerse.nl/publication/2024-louwerse-timmermans/>.
- Luhmann, Niklas, and Niklas Luhmann. *Law as a Social System*. Repr. 2007. Edited by Fatima Kastner. Oxford Socio-Legal Studies. Oxford: Oxford Univ. Press, 2007.
- Madalina, Maria, and Sunarno Danusastro. "Politik Hukum Pancasila Dalam Nafas Legislasi di Indonesia." *Jurnal Majelis, Edisi 04, Agustus 2020*, n.d.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Membatasi Periodisasi Jabatan Anggota DPR." Accessed January 7, 2026. <https://mkri.id/berita/membatasi-periodisasi-jabatan-anggota-dpr-21835>.
- Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple* (International Institute of Islamic Thought, 2008) 23-25 <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-made-simple/>, akses 19 November 2025 Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Moh Mahfud M. D. *Politik hukum di Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mun'im, Zainul. "Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqh Al-Aqalliyat." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2021): 151–72. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.
- Nabela, Reza, Koerniatmanto Soetoprawiro, and Herry Susilowati. "Keberadaan Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Anggota DPR Di Tinjau Dari Prinsip Demokrasi Perwakilan." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* Volume 4 (n.d.): 4203–5.
- "MK Putuskan Periodisasi Masa Jabatan Legislatif Tak Diperlukan." Akses 7 Januari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103012239-12-1183297/mk-putuskan-periodisasi-masa-jabatan-legislatif-tak-diperlukan>.
- "Kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk: Keadilan sebagai Pilar Utama Kepemimpinan," NU Online, akses 21 januari, 2026, <https://nu.or.id/pustaka/kitab-at-tibrul-masbuk-fi-nasihatil-muluk-keadilan-sebagai-pilar-utama-kepemimpinan-3.1>
- Nugroho, Wisnu Agung, Citranu Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh Mujibur Rohman, Asti Dwiyanti, Erman Rahim, Hidayati

Fitri, and Opniel Harsana BP. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia : Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

ngemak over gedragscode Tweede Kamer,” Montesquieu Institut, Akses 16 Desember 2025 https://www.montesquieuinstituut.nl/id/vlxdk0szw2mu/nieuws/ongemak_over_gedragscode_tweede_kamer.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Pettit, Philip. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Clarendon Press, 1997.

“Procedure Einde Kamerlidmaatschap,” Parlement.com, akses 16 Desember 2025 <https://www.parlement.com/procedure-einde-kamerlidmaatschap>.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyasah*. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Rayhan, Alendra Nauval Mufti, Salsabil Aqila, Ni Komang Dewinda Leony Putri, and Tarmizi. “Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Redbruck Theory.” *Siyasah* 4, no. 2 (November 2024): 230–42. <https://doi.org/10.32332/m8tqsh54>.

“Reglement van Orde Tweede Kamer,” Parlement.com, akses 7 Januari 2026, <https://www.parlement.com/reglement-van-orde-tweede-kamer>.

Rousseau, Jean-Jacques. *Rousseau: <I>The Social Contract</I> and Other Later Political Writings*. 2nd ed. Edited by Victor Gourevitch. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781316584606>.

Samosir, Osbin. *Partai politik dan abad 21: pengertian, fungsi, dan praktek di Indonesia*. Jakarta: UKI Press, 2022.

Samuel, Geoffrey. *Epistemology and Method in Law*. Applied Legal Philosophy. Abingdon, Oxon: Routledge, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315256207>.

Santoso AZ, Lukman. *Negara hukum dan demokrasi: pasang surut negara hukum Indonesia pasca reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.

Selfianus Laritmas, and Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

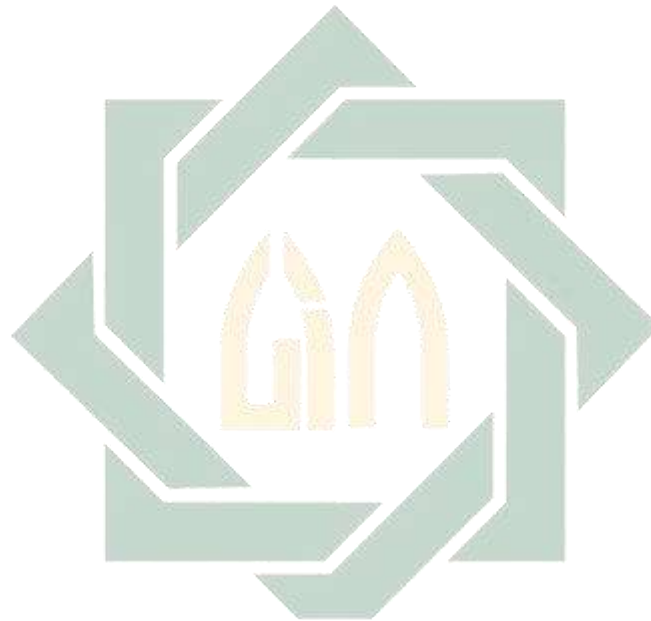
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, and Muhammmad Zamroni. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (June 2025): 161–76. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093>.
- Syafuri, H. B. *Fiqih siyasah di era globalisasi*. Edited by M. Taufiq Rahman and Ucep Hermawan. With H. B. Syafuri, M. Taufiq Rahman, and Ucep Hermawan. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025. <https://digilib.uinsgd.ac.id/106097/>.
- "Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (n.d.): 3078.
- Tutik, Titik Triwulan. "Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (October 2018): 373–98. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.373-398>.
- . *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Edisi pertama. Edited by Nunuk Nuswardani. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.
- "UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945." n.d. Accessed December 6, 2025. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.
- Usman Fauzi. *Masa Jabatan Legislatif Yang Tidak Dibatasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr, Dpr, Dpd dan Dprd (MD3) Dan Fiqh Siyasah*. n.d.
- Van Vonno, Cynthia Mc. "Achieving Party Unity in the Netherlands: Representatives' Sequential Decision-Making Mechanisms at Three Levels of Dutch Government." *Party Politics* 25, no. 5 (September 2019): 664–78. <https://doi.org/10.1177/1354068819836042>.
- Zweigert, Konrad, Hein Kötz, and Konrad Zweigert. *Introduction to Comparative Law*. 3rd revised edition. Translated by Tony Weir. New York: Oxford University Press, 1998.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Grondwet Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden 2023



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A